Komitmen Perusahaan Menjadi Muzakki

Ruslang*, Samsul, Mujetaba Mustafa

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

E-mail: ruslanazhar86@gmail.com

Abstract

Corporate zakat has been governed by clerics through a fatwa and regulated by the Indonesian government through zakat laws, have not had a significant effect on the collection of alms in companies. The zakat potential of the company is very large according to the data of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) but very low collection rates. Other Islamic countries have succeeded in making specific policies regulating the collection and distribution of zakat on companies that are obliged to pay zakat. Indonesia should be able to move the company to be fully committed in issuing zakat.

Keywords: Corporate zakat; Zakat potential; Muzakki.

Abstrak

Zakat perusahaan telah diatur oleh ulama melalui fatwa dan diatur pemerintah Indonesia lewat undang-undang zakat, belum memberikan efek signifikan terhadap pengumpulan zakat pada perusahaan. Potensi zakat perusahaan sangat besar menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) namun sangat rendah tingkat pengumpulannya. Negara-negara Islam lainnya telah berhasil membuat kebijakan khusus mengatur pemungutan dan penyaluran zakat atas perusahaan yang wajib zakat. Indonesia seharusnya mampu menggerakkan perusahaan untuk berkomitmen penuh dalam mengeluarkan zakat.

Kata Kunci: Perusahaan zakat; Potensi zakat; Muzakki.

1. Pendahuluan

Konsep fikih zakat (Samsul, Hamid, & Nasution, 2019) menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (mustahik) menjadi surplus (muzakki). Pengumpulan dan penyaluran, dan potensi zakat (termasuk infak dan sedekah) sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, akhir-akhir ini sudah menjadi primadona untuk disoroti dalam kajian multi dimensi dalam khasanah literatur ekonomi Islam. Memang kenyataannya zakat sebagai teori sudah banyak di eksplorasi para ahli intelektual Muslim yang concern kepada pembangunan dan keuangan publik.

Perusahaan wajib mengeluarkan zakat (Reza, 2018), karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum (recht person) atau yang dianggap orang. Oleh karena itu diantara individu itu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat.

Mufraini dalam (Reza, 2018) menyebutkan bahwa: “yang dimaksud dengan perusahaan dalam konteks perhitungan zakat adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan saham. Khorunnisa dalam (Rahmadani, Bulkis, & Fahmi, 2018) menjelaskan, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata.

Saham dianggap bagian prosentatif dari modal usaha, maka harus dikeluarkan zakatnya oleh para pemegang saham masing-masing. Pihak perusahaan bisa mengeluarkan zakatnya sebagai perwakilan mereka jika itu ditegaskan dalam peraturan dasar mereka atau bisa juga diserahkan kepada para pemilik saham untuk dikeluarkan zakatnya.

Yusuf Qardhawi menjelaskan, perusahaan-perusahaan dagang yaitu modalnya yang terletak dalam bentuk barang yang diperjual belikan dan materinya tidak tetap, dipungut zakat dari sahamnya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar ditambah dengan keuntungannya, sedangkan besar zakatnya 2,5% setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham dikeluarkan.

Permasalahan pengelolaan zakat perusahaan (Rahim & Sahrullah, 2017) merupakan isu yang penting karena memiliki potensi yang sangat besar dalam menyejahterakan umat. Masalah ini terutama berkaitan dengan aspek perhitungan zakat, pemungutan zakat, penyaluran zakat, dan akuntansi dan pengungkapan zakat perusahaan. zakat perusahaan menurut Ahmed merupakan salahsatu jenis zakat yang harus dipungut, jika memiliki harta melebihi nisab dan melampaui masa haulnya, sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur'an, as-Sunah, dan ijma' ulama.

Sesuai data badan amil zakat nasional dalam (Rahmadani et al., 2018) sebenarnya potensi zakat di Indonesia tergolong tinggi, hanya saja belum maksimal penghimpunannya. Salah satu zakat yang belum terhimpun secara maksimal adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang memiliki kekayaan sendiri dan memiliki kemampuan secara hukum. Sebagai contoh, potensi zakat dari sector industri di negara Indonesia mencapai Rp22 triliun pertahun. Lebih lanjut Firdaus, Beik, Irawan, & Juan dan menjelaskan, dari sector perdagangan, jasa dan sector usaha lainnya yang terus berkembang. Begitu tinggi potensi zakat nasional, terutama zakat perusahaan. Namun, dana zakat perusahaan yang bias dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Pengelola Zakat masih sangat kecil.

Negara dengan mayoritas penduduk muslim tentu Indonesia memiliki potensi yang tinggi pada zakat. Hal itu ditunjukan dengan perolehan zakat terus bertambah di setiap tahunnya. Begitu juga dalam pengumpulan dana zakat dari perusahaan. Namun terdapat indikasi yang ditemukan (Alfirdaus, n.d.) bahwa minimnya pemahaman perusahaan mengenai zakat perusahaan menjadikan beberapa perusahaan tidak menunaikan kewajiban zakat perusahaan itu sendiri.

Harus diakui bahwa kewajiban zakat perusahaan (Alfirdaus, n.d.) dipandang sebagai syakhsiah hukmiah, masih mengandung khilafiyah dikalangan ulama kontemporer. Meskipun masih terdapat khilafiyah, umumnya ulama mengkategorikan lembaga badan hukum itu sebagai penerima hukum taklif dari segi kekayaan yang dimilikinya sebagaimana dijelaskan Reza. Karena pada dasarnya badan hukum tersebut merupakan himpunan dari beberapa orang yang terkena taklif tersebut. Masih banyak

perdebatan mengenai apakah perusahaan merupakan subjek zakat. Namun menilai perusahaan merupakan kumpulan pemegang saham yang merupakan subjek zakat tentu hal ini menjadi mungkin.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data-data tertulis seperti buku, kitab, majalah, jurnal, surat kabar dan lain-lain. Menurut Hadari Nawawi dalam (Samsul et al., 2019), metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sebagai pendekatannya digunakan metode deskriptif analisis, menurut Wasty Soemanto dalam (Samsul et al., 2019) metode deskriptif yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang. maksudnya yaitu, deskriptif berarti menggambarkan, analisis berarti menguraikan. Jadi pengertian deskriptif analisis dalam penelitian ini yaitu menguraikan dan menggambarkan data yang diperoleh tentang sistem pengendalian inflasi dalam sistem ekonomi Islam.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Tinjauan teoritis

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, kewajibannya telah disebutkan berulang ulang oleh Allah di dalam al-Qur'an.

Allah SWT berfirman dalam QS at-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.

Menurut Nurhayati dan Wasilah dalam (Sumiyati, 2019), “zakat perusahaan adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para ahli fikih”. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan pada zakat perdagangan, karena jika dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan inti sebuah perusahaan adalah berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Setiap harta dan hasil usaha harus dikeluarkan zakatnya karena zakat merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan antar sesama pelaku usaha.

Mengenai kewajiban perusahaan, Kementerian Agama Republik Indonesia dalam (Rahmadani et al., 2018) menjelaskan, untuk membayar zakat Agama Republik Indonesia (Permenag RI) No.52/2014 pasal 1 dan 2 yang memaparkan bahwa zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki, yang mana muzaki tersebut terbagi atas muzaki perorangan dan muzaki badan usaha (Perusahaan). Zakat perusahaan bukan merupakan kolektif dari gaji karyawan atau yang sejenis, melainkan dana yang di ambil khusus dari perusahaan itu sendiri. Zakat perusahaan" (Corporate zakat) (Pertiwi & Laily, 2018) adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik. Ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif. Gejala ini dimulai dengan prakarsa para pengusaha dan manajer muslim modern untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Kaum cendekiawan muslim ikut mengembangkan sistem ini, dan akhirnya BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) juga ikut memperkokoh pelaksanaannya. Para ulama peserta muktamar internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dan aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, nishabnya adalah sama dengan nishab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.

Mengenai zakat saham (Fielnanda, 2018), beberapa tahun yang lalu telah ada Fatwa Komite Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam, Jeddah. Nasar menjelaskan bahwa, dalam fatwa tersebut dinyatakan: Pertama, saham perusahaan wajib dizakati oleh pemilik saham. Perusahaan dapat bertindak sebagai wakil pemilik saham untuk menyalurkan zakatnya atas nama mereka. Kedua, dewan manajerial dapat menyalurkan zakat saham perusahaan bagaikan subjek hukum konkret membayar zakatnya, dengan arti bahwa semua saham yang terdapat dalam perusahaan tertentu dianggap bagaikan sebuah harta milik seorang. Ketiga, bila perusahaan tidak membayar zakat sahamnya, para pemegang saham wajib membayar zakat sahamnya masing-masing. Bila pemilik saham memperoleh keterangan tentang pembayaran zakat sahamnya pada perusahaan tersebut, berarti kewajiban zakatnya telah selesai sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Bila pemegang saham tidak mendapatkan keterangan tersebut, dilihat niat pemegang saham tersebut, kalau niatnya sewaktu mendepositkan saham hanya untuk memperoleh penghasilan tahunan dari deposit tersebut, dia membayar zakatnya atas dasar zakat eksploitasi, yaitu sebesar 2,5 persen dari keuntungan (di luar modal) dengan mempertimbangkan haul terhitung dari saat penerimaan keuntungan tersebut dan syarat serta penghalang lainnya. Keempat, bila seorang pemilik saham menjual sahamnya di tengah-tengah haul, dia diharuskan menggabungkan harga saham tersebut dengan harta kekayaannya yang lain, seterusnya membayar zakatnya sekalian, bila haulnya sempurna. Pembeli diharuskan membayar zakat saham yang baru dibeli tersebut sesuai ketentuan di atas. Selain itu, seminar zakat 1, yang diselenggarakan di Kuwait tahun 1404 H/ 1984 mengeluarkan rekomendasi bahwa wajibnya zakat kekayaan dan aset perusahaan yang dibebankan atas perusahaan penanaman modal karena merupakan badan hukum abstrak.

Pemegang saham (Pertiwi & Laily, 2018) merupakan bagian dari pemilik perusahaan yang mewakilkan operasionalnya kepada pihak manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan dimana keuntungan dan kerugian perusahaan ditanggung bersama oleh pemegang saham. Keuntungan dan kerugian perusahaan dapat diketahui pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pada saat itulah

zakat diwajibkan. Pendapat pertama (Pertiwi & Laily, 2018) yang dikemukakan oleh Syeikh Abdurrahman dalam kitabnya "al-Muamalah al-Haditsah wa Ahkumaha" mengatakan bahwa yang harus diperhatikan sebelum pengeluaran zakat adalah status perusahaannya, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak dibidang layanan jasa semata, misalnya biro perjalanan, biro iklan, perusahaan jasa angkutan (darat, laut, udara), perusahaan hotel, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Hal ini dikarenakan saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Namun keuntungan yang diperoleh dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya jika telah mencapai nisab dan haul.

Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang murni yang melakukan transaksi jual beli barang tanpa melakukan proses pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, dan lain lain, maka saham-saham perusahaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya disamping zakat dari keuntungan yang diperoleh. Caranya adalah dengan menghitung kembali jumlah keseluruhan saham kemudian dikurangi harga alat-alat, barang-barang ataupun inventaris lainnya, baru kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.

Jika perusahaan tersebut bergerak dibidang industri dan perdagangan, artinya melakukan pengolahan suatu komoditi dan kemudian menjual kembali hasil produksinya, seperti perusahaan Minyak dan Gas (MIGAS), perusahaan pengolahan mebel, marmer dan sebagainya, maka sahamnya wajib dizakatkan.

3.2. Analisis dan Pembahasan

Model pengelolaan zakat (Amiruddin, 2015) di negara-negara Muslim dapat dikategorikan menjadi 3 model: Pertama, negara-negara yang mewajibkan zakat. Kedua, negara tidak mewajibkan zakat kepada warganya, melainkan diarahkan masing-masing individu atau zakat hanya merupakan kewajiban agama dan tidak diwajibkan oleh negara. Ketiga, model pengelolaan zakat dimana disamping negara juga swasta (masyarakat sipil) dapat mengelola zakat secara sama-sama seperti Indonesia, hal yang sama dikemukakan (Ridwan, 2014). Berikut model pengelolaan zakat di negara-negara Islam:

Arab Saudi

Pelaksanaan zakat di Arab Saudi (Amiruddin, 2015) didasarkan pada perundang-undangan yang dimulai pada tahun 1951 M. Sebelum pengundangan ini, zakat tidak diatur oleh perundang-undangan. Setelah Raja mengeluarkan Keputusan Raja (Royal Court) No. 17/2/28/8634 tertanggal 29 Juni 1370 H bertepatan dengan tanggal 7 April 1951 yang isinya 'Zakat Syar'i' yang sesuai dengan ketentuan syari'ah islamiah diwajibkan kepada individu perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi. Kewenangan penghimpunan zakat di Saudi (Amiruddin, 2015) semuanya berada dalam satu kendali yaitu departemen keuangan, mulai dari aspek kebijakan sampai teknis, sehingga peraturan-peraturan zakat yang ada banyak terfokus pada penghimpunan, sedangkan untuk penyaluran, kewenangannya ada pada departemen sosial dan pekerjaan dibawah dirjen jaminan sosial (dhamanijtima'i).

Sudan

Peraturan pengelolaan zakat di Sudan dimulai dengan diundangkannya Undang-undang yang berkaitan dengan Diwan Zakat, April 1984 dan mulai efektif terhitung September 1984. Aturan ini mewajibkan warga negara Sudan mengeluarkan zakat yang sebelumnya diatur sebagai tindakan sukarela saja dalam kurun waktu 1980-1984. Kewajiban zakat di Sudan tergantung kepada kewarganegaraan dan agama seseorang. Zakat hanya diwajibkan kepada warga negara Sudan yang beragama Islam dan memiliki harta, kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi warga negara yang ada di dalam negeri, warga negara Sudan yang berada di luar negeri pun wajib mengeluarkan zakat. Selain kewarganegaraan, domisili juga menjadi penyebab seseorang menjadi wajib zakat. Setiap orang yang berdomisili di negara Sudan dan memiliki harta wajib berkewajiban membayar zakat.

Pakistan

Negara Pakistan didirikan tahun 1950 dan baru pada tahun 1979 mengundangkan aturan zakat yang disebut dengan Undang-undang zakat dan Usyr. Pertama kali dikeluarkan UU tersebut belum sempurna dan baru pada tahun 1989 UU tersebut disempurnakan. Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik disebut dengan Central Zakat Fund (CSF) yang dipimpin secara kolektif oleh enam belas anggota yang salah satu di antaranya adalah Hakim Agung Pakistan. CZF memiliki kewenangan menentukan berbagai kebijakan yang terkait zakat. Secara hirarkis, CSF menempati urutan teratas struktur badan zakat di Pakistan, di bawah CSF ada empat Provincial Zakat Fund yang membawahi 81 Local Zakat Fund sampai ke tingkat unit pengumpul yang berada di daerah.

Yordania

Kerajaan Yordania telah mengambil inisiatif menetapkan undang undang khusus mengenai pemungutan zakat pada 1944 M dan merupakan Negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang sejenis. Undang-undang dimaksud mewajibkan pemungutan zakat di Kerajaan Yordania. Tahun 1988, ditetapkan Undang-undang mengenai Shunduq Zakat yang disebut Undang-undang Shunduq Zakat tahun 1988 yang memberikan landasan yuridis kepada Shunduq Zakat dan memberikan independensi anggaran dan pengelolaan serta kewenangan untuk menuntut pelanggaran zakat di muka pengadilan.

Kuwait

Perkembangan pengelolaan zakat di Kuwait terbagi menjadi tiga fase antara lain: pertama, fase pengelolaan individu. Zakat dikelola secara sukarela dan bersifat pribadi dengan inisiatif para dermawan dalam membantu mereka yang membutuhkan. Kedua, fase pengelolaan kelompok. Tahap ini berlangsung bersamaan dengan berkembangnya masyarakat kuwait seiring dengan perkembangan perdagangan sebagai sumber utama pendapatan negara. Ketiga, fase pengelolaan secara kelembagaan. Munculnya cikal bakal pengelolaan zakat dalam bentuk lembaga yang terorganisir bermula pada awal abad ke-20 dengan didirikannya al-Jam'iyyah al-Khairiyyah alArabiyyah pada 1913 M.

Malaysia

Malaysia dengan negara berpenduduk mayoritas muslim, penghimpunan zakat yang dilakukan murni oleh swasta sangat didukung oleh pemerintah setempat. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan penanggungjawab. Pada pemerintahan PM

Mahatir Mohammad tidak menempatkan zakat sebagai komponen penting dalam membasmi kemiskinan. Dalam wilayah penyelenggaraan, pengelolaan zakat di negara ini ditempatkan dalam Majelis Agama Islam (MAI).

Koordinasi MAI ada dalam kementerian non departemen. Peran dan fungsi menteri non departemen yakni membuat lembaga strategis yang bertanggungjawab langsung pada perdana menteri. Dari kementerian MAI ini, lahir terobosan yang amat inovatif yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Tabung Haji (TH). Ada 4 (empat) kebijakan pengelolaan zakat oleh pemerintah Malaysia antara lain: pemerintah merestui status hukum dan posisi PPZ sebagai perusahaan murni yang khusus menghimpun zakat; mengizinkan PPZ mengambil 12.5% dari total perolehan zakat setiap tahun, untuk menggaji pegawai dan biaya operasional; pemerintah menetapkan zakat menjadi pengurang pajak; dan pemerintah mengalokasikan dana guna membantu kegiatan BM dalam membasmi kemiskinan.

Indonesia

Menurut penelitian Firdaus dalam (Alam, 2018) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4% dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. Sedangkan menurut BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.

Zakat memiliki potensi (Nurhasanah, 2018) yang luar biasa untuk mengatasi kemiskinan bangsa dan mensejahterakan umat. Potensi ini harus disadari oleh seluruh umat muslim agar dana yang dikumpulkan melalui zakat bias mensejahterakan umat.

Berdasarkan riset tahun 2011 (Sumiyati, 2019) yang berjudul *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*, potensi zakat di Indonesia mencapai angka Rp217 triliun atau setara dengan 3,40% dari total PDB untuk setiap tahunnya. Potensi zakat nasional tersebut diklasifikasikan kedalam tiga kelompok besar, yakni potensi zakat rumah tangga, potensi zakat industri (perusahaan) swasta dan BUMN, serta potensi zakat tabungan. Adapun potensi dan realisasi zakat perusahaan bank umum syariah pada tahun 2015 adalah bahwa potensi zakat bank umum syariah mencapai Rp 48.954.275 ribu, sementara realisasinya hanya mencapai Rp 25.085.855 ribu atau setara dengan 51,24%. Dengan demikian, masih ada Rp 23.868.420 ribu atau 48,76% dana zakat perusahaan dari BUS di Indonesia yang belum terungkap. Hal tersebut membuktikan bahwa penghimpunan zakat perusahaan dari BUS di Indonesia masih sangat rendah.

Pelaporan zakat perusahaan di Indonesia (Rahmadani et al., 2018) ada dalam PSAK No. 101 yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK No. 101 menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan entitas syariah terdiri dari 5 elemen. Dua dari laporan tersebut menurut Andriani & Mairijani adalah (1) pernyataan sumber dan penggunaan dana dalam dana zakat dan amal (2) pernyataan sumber dan penggunaan dana dalam dana qard. Sayangnya menurut Andriani, Rakhmawati, & Fahmi, terdapat 3 Bank Umum Syariah yang tidak menyajikan LSPDZ (Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat) dari 10 Bank Umum Syariah yang diteliti

laporan keuangannya. Ketidakpatuhan dengan standar itu mungkin terjadi karena tidak adanya fatwa oleh MUI yang mewajibkan entitas untuk membayar zakat.

3.3. Komitmen Perusahaan Menjadi Muzakki

Mengenai proses regulasi pengelolaan zakat (Wahid, 2018) hingga zakat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini pajak penghasilan), hal ini sudah diatur sejak adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan kemudian lebih dipertegas oleh UU Zakat yang terbaru yang menggantikan.

Undang-undang 38/1999 yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan ini masih diatur dalam UU yang terbaru yakni dalam Pasal 22 UU 23/2011 “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak” (Wahid, 2018).

Pergulatan pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia, integrasi zakat dan pajak merupakan perbincangan baru yang selama satu dekade terakhir menjadi lebih sering diperbincangkan dan dibahas baik dalam kacamata hukum positif maupun hukum Islam. Perdebatan paling krusial terletak pada dasar pengelolaan zakat dan pajak yang dianggap memiliki unsur-unsur yang berbeda dengan pajak. Beberapa ulama yang mengeluarkan ijtihad syar’inya terkait dengan integrasi zakat dan pajak antara lain Masdar Farid Mas’udi, Didin Hafiddudin, dan MUI (Wahid, 2018).

Pemegang saham (Pertiwi & Laily, 2018) merupakan bagian dari pemilik perusahaan yang mewakilkan operasionalnya kepada pihak manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan dimana keuntungan dan kerugian perusahaan ditanggung bersama oleh pemegang saham. Keuntungan dan kerugian perusahaan dapat diketahui pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pada saat itulah zakat diwajibkan. Namun para ulama berbeda tentang kewajiban pengeluaran zakatnya.

Perusahaan sebagai wajib zakat (muzakki) (Alim, n.d.) juga telah di fatwakan oleh MUI sejak tahun 2004. tetapi nampaknya belum berpengaruh signifikan terhadap kemauan dan komitmen perusahaan untuk menjadi muzakki. Analisis penulis, sejumlah tantangan yang dihadapi perusahaan untuk menjadi muzakki antara lain; Pertama, Tidak ada sanksi bagi pelanggar. Adanya fatwa dan bahkan keberadaan UU yang mengatur zakat belum mampu memberikan sanksi administrasi sekalipun apalagi pidana bagi pelanggarnya. Para wajib zakat yang tidak membayar zakat tidak bisa dikenakan sanksi berdasarkan UU maupun peraturan lain termasuk fatwa. Padahal UU semestinya dapat berfungsi demikian. BAZNAS sebagai Lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola serta mengawasi zakat oleh UU bukan merupakan lembaga Negara yang berhak memberikan sanksi administrasi bagi wajib zakat (individu dan badan usaha) yang tidak melaksanakan zakatnya. Berbeda dengan kewenangan Ditjend Pajak Kemenkeu. Oleh karena itu, UU yang mengatur zakat juga mengatur sanksi administrasi dan kewenangan lembaga yang mengatur dan atau mengelola zakat setingkat lembaga Negara yang berwenang memberikan sanksi;

Kedua, Perusahaan dihadapkan pada potensi pembayaran ganda dengan pajak (double payment). Sebelum ada aturan yang jelas dan legal yang bersifat mengikat antara zakat perusahaan dan pajak perusahaan (pajak penghasilan badan usaha), maka

perusahaan akan menunda atau tidak membayar zakat perusahaan. Apalagi bagi perusahaan yang mengelola sumber daya alam, berdasarkan UU Perseroan Terbatas, mereka diwajibkan untuk membayar tanggung jawab social perusahaan terhadap lingkungan. Sehingga apabila kewajiban zakat perusahaan diterapkan mereka berpotensi triple payment yaitu beban pajak, tanggung jawab social, dan zakat;

Ketiga, Potensi khlafiyah wajib zakat perusahaan sebagai muzaki. Syarat wajib zakat diantaranya adalah beragama Islam. Perusahaan sebagai badan usaha yang dikelola perorangan identic dengan wajib zakat perorangan karena keuntungan perusahaan adalah milik perorangan. Sementara itu, perusahaan sebagai badan usaha yang dimiliki banyak orang (pemodal) yang berbeda agama serta kemungkinan kepemilikannya (saham) tidak hanya oleh perorangan tetapi juga institusi maka keuntungan perusahaan bukan milik orang-perorang. Celah dari kondisi ini dapat menjadi rasionalisasi perusahaan tidak termasuk muzaki;

Keempat, Metode dan basis penghitungan zakat juga menjadi perdebatan. Setidaknya PMA di atas dapat digunakan referensi dan atau pedoman. Perbedaan metode penghitungan juga berimplikasi terhadap perlakuan akuntansi. Di beberapa Negara yang telah disebutkan di atas juga telah diantisipasi dengan diberlakukannya standar akuntansi untuk perlakuan akuntansi zakat perusahaan. Sementara itu, di Indonesia juga telah diterbitkan standar akuntansi untuk zakat bahkan telah ada tiga standar akuntansi yang mengatur tentang akuntansi zakat tetapi ketiganya belum mengatur akuntansi zakat perusahaan khususnya bagi perusahaan yang menjadi muzaki zakat perusahaan.

Faktor tingkat pemahaman agama (Mukhlis & Beik, 2018) juga menjadi tolak ukur keengganan menjadi muzakki, seharusnya semakin baik pemahaman agama seseorang membuat ia semakin termotivasi untuk menunaikan zakat. Karena ia sudah mengerti bahwa membayar zakat adalah sebuah kewajiban, ia mengetahui balasan-balasan kebaikan yang akan dia dapatkan jika membayar zakat, dan mengetahui hukuman-hukuman bagi mereka yang tidak mau membayar zakat padahal mereka mampu.

Perusahaan (Hadi, 2016) dihadapkan pada kewajiban CSR dan Zakat, keduanya memiliki kewajiban yang sama terhadap aturan negara. Namun beda dari segi kewajiban agama. CSR adalah pertanggungjawaban sosial sedangkan zakat pertanggungjawaban terhadap Allah. Jika perusahaan membayar keduanya maka akan berpengaruh terhadap pendapatan.

Perusahaan mengeluarkan zakat secara mandiri bukan melalui badan amil zakat (BAZ) atau lembaga amil zakat (LAZ) resmi, sehingga tidak tercatat dan dilaporkan secara resmi bahwa perusahaan tersebut telah mengeluarkan zakat. Seperti pemahaman umum masyarakat, bahwa mengeluarkan zakat itu tidak harus melalui BAZ atau LAZ tapi bisa dilakukan sendiri secara kepada mustahik yang terpenting tepat sasaran. Demikian juga dengan perusahaan, banyak memilih untuk menyalurkan secara langsung zakat perusahaan kepada mustahik baik dalam bentuk program produktif atau konsumtif.

Berdasarkan hasil penelitian Yusuf Wibisindo, menyimpulkan bahwa, argumentasi yang melandasi UU No. 23/2011 di Indonesia tentang otoritas pengelolaan zakat hanya pemerintah semata yang diklaim bersumber dari al-Qur'an dan hadits serta pemikiran dunia Islam klasik hingga kontemporer. Namun Yusuf menanggapi bahwa praktek pengelolaan zakat adalah sesuatu yang dinamis, terbuka terhadap banyak

interpretasi fiqh dan secara empiris menjadi ruang eksperimen yang luas dalam sejarah Islam. Pelaksanaan kewajiban zakat merupakan kewajiban moral terhadap Tuhan pelaksanaannya lebih banyak ditentukan oleh kesadaran pribadi dan keyakinan individu.

4. Penutup

Para ulama telah sepakat dengan kewajiban zakat perusahaan, sebagaimana hasil muktamar ulama internasional yang kemudian dijadikan pijakan hukum oleh ulama pada setiap negara termasuk ulama Indonesia. Potensi zakat perusahaan yang sangat besar dan belum terkelola dengan maksimal membuat pemerintah ikut andil dalam membuat regulasi zakat perusahaan ditandai dengan diterbitkannya undang-undang yang mengatur tentang kewajiban zakat serta zakat sebagai pengurang pajak. Kendati ulama dan pemerintah telah membuat aturan kewajiban zakat, namun belum berpengaruh signifikan terhadap komitmen dan kemauan perusahaan untuk membayar zakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman perusahaan tentang agama serta zakat itu sendiri.

Referensi

- Alam, A. Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 128. 2018.
- Alfirdaus, A. S. (n.d.). *Menunaikan Zakat Perusahaan (Studi di PT Maskapai Reasuransi Indonesia . Tbk dan PT Krakatau Steel. Persero . Tbk .*
- Alim, N. (n.d.).
- Amiruddin, K. Model-model pengelolaan zakat di dunia muslim. *Ahkam*, 3(1).
- Fielnanda, R. (2018). Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi). *Al-Tijary*, 3(1), 57. 2015.
- Hadi, A. C. Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *AHKAM Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 229–240. 2016.
- Mukhlis, A., & Beik, I. S. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 83–106. 2018.
- Nurhasanah, S. Maksimalisasi potensi zakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat siti nurhasanah. *JEBI*, 3(2). 2018.
- Pertiwi, H. I., & Laily, S. N. (2018). Konsep, Aplikasi, Dan Perilaku Akuntansi Terhadap Zakat Aset Pada Perusahaan Dagang (Studi Pada Toko Emas Gajah Di Sidoarjo. T.th.
- Rahim, S., & Sahrullah. Pengelolaan zakat perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 200–215. 2017.
- Rahmadani, R. A., Bulkis, S., & Fahmi, M. Y Analisis regulasi atas zakat perusahaan pada negara indonesia, malaysia, dan arab saudi. 6014, 485–494. 2018.
- Reza, H. Mengangkat Nilai “Zakat Dengan Hati” : Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan Pengusaha Arab. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 2018.

- Ridwan, M. Zakat Vs Pajak : Studi Perbandingan di Beberapa. *Ziswaf*, 1, 123-144. 2014.
- Samsul, Hamid, N. M., & Nasution, H. G. Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* Penerbit:, 1, 16-28. 2019.
- Sumiyati, A. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 5(1), 1-9. 2019.
- Wahid, M. A. R. Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 27-58. 2018.